

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan terhadap rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 melahirkan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 melahirkan undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi yaitu UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketiga lembaga negara yang disebutkan diwajibkan melakukan pengisian jabatan hakim konstitusi secara transparan dan partisipatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 UU MK. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi merupakan kewenangan dari masing-masing lembaga negara yang berhak mengajukannya.
2. Indonesia secara konsep pengisian jabatan hakim konstitusi menganut pola *Representative Appointment*, yaitu melibatkan tiga lembaga negara lainnya. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip *checks and balances*.
3. Asas transparansi dan partisipatif memiliki peranan yang begitu penting dalam menjamin kewenangan yang dimiliki oleh MK. Asas ini juga berfungsi bagaimana independensi para calon hakim konstitusi dapat dilihat melalui proses yang terbuka dan melibatkan publik. Di dalam UU yang berlaku pun tidak diatur bagaimana bentuk dan penerapan dari asas tersebut. Hal ini yang membuat penulis rasa terdapat ketidaksesuaian terhadap pengisian jabatan hakim konstitusi.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan terkait penulisan hukum ini yaitu :

1. Membuat aturan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian jabatan Hakim Konstitusi pada masing-masing lembaga pengaju agar diketahui oleh masyarakat.
2. Dibuat Tim Seleksi yang melibatkan ketiga lembaga negara tersebut ketika terjadi penggantian hakim konstitusi yang kemudian prosesnya disiarkan dan dipublikasikan dihadapan publik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Mukhtie Fadjar. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Cetakan ke-1. Jakarta: Konstitusi Press. 2006
- A. Muh. Asrun. *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung dibawah Soeharto*. Jakarta. ELSAM. 2004
- A.V. Dicey. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: English Language Book Society and Macmillan. 1971
- Bachtiar. *Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Cetakan ke-1, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015
- Bagir Manan. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum UII. 2003
- _____. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007
- Dr. Utari Christiani R. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. 2013
- Hamdan Zoelva. *Mengawal Konstitualisme*. Cetakan ke-1. Jakarta: Konstitusi Press. 2016
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Kostitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2010
- J. Johansyah. *Independensi Hakim di Tengah Benturan Politik dan Kekuasaan dalam Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Komisi Yudisial. 2010

Mahfudz, Moh. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 1999

Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Cetakan ke-1. Jakarta: Konstitusi Pers. 2005

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Kosntitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006

_____. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006

_____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta. Bhuna Populer. 2007

_____. *Model-model pengujian konstitusional diberbagai Negara*. sekretariat jenderal dan kepaniteraan MKRI. Jakarta. Mei. 2005

Mahkamah Konstitusi RI. *Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta. 2006

_____. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku ke-VI, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008

Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. 2002

Moh. Kusnardi dan R. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1994

Munir Fuady. *Teori Negara Hukum*. Cetakan ke-2. Bandung: Refika Aditama. 2011

Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. 2010

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986

Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cetakan ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group. 2015

Tom Ginsburg. *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in Asian Case*. Cambridge: University Press. 2003

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-6. Jakarta: Sinar Grafika. 2015

JURNAL & MAKALAH

Ery Satyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.44, Desember, 2014

Miftakhul Huda, “Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi* Vol. IV, September 2007

Jimly Asshiddiqie. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Implementasi MOU Helsinki dan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pilkada Aceh tahun 2011

Moh. Mahfud MD, makalah Undang- Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan, disampaikan dalam seminar konstitusi “Kontroversi Amandemen UUD 1945 dan Pengaruhnya terhadap Sistem Ketatanegaraan, Jakarta, 12 April 2007

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang perubahan terhadap UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

INTERNET

Ali Salmande, Patrialis Hakim MK, Keppres Pengangkatannya Digugat, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5209c3887b1aa/patrialis-hakim-mk-keppres-pengangkatannya-digugat>, Diunduh tgl 2 Juni 2017

Hukum Online, Dua Ahli Setuju Periodisasi Jabatan Hakim MK Dihapus, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b4d07b16eaf/dua-ahli-setuju-periodisasi-jabatan-hakim-mk-dihapus>, Diunduh tgl 30 Mei 2017

_____. Setara Institute Lansir Hasil Survei Tentang MK, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5281065909ec/setara-institute-lansir-hasil-survei-tentang-MK>, diunduh tgl 2 Juni 2017

Jimly Asshidiqqie. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia. <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/>. Diunduh tgl 03 Sep 2016

Kontras, Seleksi Hakim Konstitusi Versi DPR, Tidak Partisipatif dan Penuh Ketidakjelasan, <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=702>, Diunduh tgl 30 Mei 2017

Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diunduh pada tanggal 12 februari 2017

Mahkamah Agung RI, Usulan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi RI dari Mahkamah Agung RI, <https://www.mahkamahagung.go.id/acc2017/level2.asp?bid=1838>, Diunduh pada tgl 25 Maret 2017

_____. MA Buka Pendaftaran Calon Hakim Konstitusi, <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/877-ma-buka-pendaftaran-calon-hakim-konstitusi-dari-unsur-ma>, Diunduh tgl 5 Juli 2017

Moch. Ali Safa'at, Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2016/06/PENGISIAN-DAN-MASA-JABATAN-HAKIM-KONSTITUSI.pdf>, diunduh pada tanggal 1 mei 2017

Sabrina Asril, Inilah Tahapan Seleksi Calon Hakim MK Pengganti Hamdan Zoelva, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/10/15150691/Inilah.Tahapan.Seleksi.Calon.Hakim.MK.Pengganti.Hamdan.Zoelva>, Diunduh tgl 19 Maret 2017

Sugiaryo, Kemerdekaan dan Kemandirian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Kekuasaan Kehakiman,

<http://sugiaryo.blogspot.co.id/2009/06/kemerdekaan-dan-kemandirian-mahkamah.html>, diunduh tgl 01 mei 2017

Verfassungsgerichtshof, Members of The Constitutional Court of Austria,
https://www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/verfassungsrichter/members_of_the_constitutional_court_overview.en.html, Diunduh tgl 30 Mei 2017